



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAMBANG SUDARMANTO**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **496924**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.220.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/160 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah Seluas 341 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. Tanah Seluas 183 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 163 m2/120 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 114.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOBIL, HONDA FREED GB3 1.5E AT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 40.850.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 163.283.646**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.538.133.646

III. HUTANG Rp. ----



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.538.133.646

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.